



Judul : Pacu prestasi atlet, Revisi UU No 3/2015
Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Pacu Prestasi Atlet, Revisi UU No 3/2015

JAKARTA-Komisi X DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tujuannya guna memacu Indonesia dalam meraih perolehan medali dalam gelaran Asian Games yang dihelat Agustus mendatang. Pasalnya, regulasi saat ini tidak terdapat acuan frasa yang menyatakan bagaimana penghargaan pemerintah kepada seorang atlet berprestasi.

Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nizar Zahro mengatakan, terkait masalah regulasi yang mengatur tentang keolahragaan saat ini Indonesia baru memiliki UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Di dalam regulasi tersebut tidak terdapat acuan frasa yang menyatakan bagaimana penghargaan pemerintah kepada seorang atlet berprestasi.

"Peraturan pemerintah dari undang-undang ini juga lebih tragis lagi, yakni tidak menjelaskan tentang siapa yang termasuk kategori atlet berprestasi itu. Hanya ada Peraturan

an Presiden Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Namun Perpres ini dianggap tidak kuat, karena UU-nya tidak menjelaskannya secara spesifik," ujarnya dalam acara diskusi Forum Legislasi bertema 'Pacu Asian Games, Apa Kabar Regulasi Kesejahteraan Atlet Perprestasi?' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Di negara lain, sambung politisi Partai Gerindra itu, atlet dianggap sebagai pahlawan karena mengharumkan nama bangsa, sehingga dilindungi secara UU. Menurutnya, solusi untuk bisa mensejahterakan atlet nasional bisa dilakukan dengan dua pilihan, yakni dengan revisi UU Nomor 3 tahun 2005 atau dengan mengajukan undang-undang baru. "Selagi undang-undang ini belum diubah atau diganti oleh DPR dan pemerintah, maka jangan harap atlet-atlet kita akan mendapatkan penghargaan yang lebih. Berbeda dengan negara-negara lain, dimana

para atletnya diberi tunjangan selama seumur hidup," ungkapnya.

Nizar menyatakan, penghargaan terhadap atlet akan bernilai baik apabila dilakukan secara terorganisir, tetapi kalau tidak terorganisir dengan baik maka akan membunuh prestasi atlet itu sendiri. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk memperjuangkan nasib atlet Indonesia agar dihargai oleh negara. Dana abadi untuk olahraga, lanjutnya, juga diperlukan guna menunjang kesejahteraan atlet dan perawatan sarana prasarana olahraga. "Dana abadi ini sudah kami usulkan di Banggar dan Kementerian Keuangan agar atlet-atlet kita terjamin hidupnya," imbuhnya.

Dia menuturkan, jika disetujui maka ada lembaga baru bernama Lembaga Aset Atlet Nasional atau apapun namanya untuk mengawasi jalannya penggunaan dana itu hingga tingkat daerah. Menurutnya cukup Rp 20 triliun tiap tahun dana abadi itu mengucur dari APBN sebagai bentuk penghargaan kepada atlet dan jamin-

an hidupnya. "Kalau zaman dulu ada SDSB (Sistem Dana Sosial Berhadiah, Red) atau Forkas di mana negara bisa mencari uang untuk kesejahteraan atlet," ulasnya.

Hanya, kata Nizar, yang membedakan dengan SDSB dan Forkas pada pengawasannya. "Jadi perlu juga ada lembaga baru seperti LMAN atau juga bisa dititipkan ke Kemenpora," pungkasnya.

Diamini Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Dia mengatakan, skema penghargaan bagi atlet berprestasi sebetulnya tengah dibahas di Komisi X DPR bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pembahasan ini bersamaan dengan persiapan Asian Games yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang dan untuk mengapresiasi atlet berprestasi sudah ada rancangan pengalokasian. "Menteri memberikan saran untuk medali emas di event internasional berapa ratus juta, untuk perak sekian ratus juta, untuk perunggu berapa," kata Hetifah di



CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

DISKUSI-Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, dan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi, di Jakarta, Selasa (24/7).

lokasi yang sama.

Kemudian, lanjut politisi Partai Golkar itu, dalam rancangan Menpora juga ada insentif lainnya bagi atlet berprestasi. Ini semua sudah menjadi bagian dari pembahasan hanya saja, akan ada konsekuensi berupa jumlah anggaran yang akan dikeluarkan, hal ini perlu cermati Banggar DPR. "Event olahraga internasional juga kan ada banyak, ada SEA Games, ada Asian Games dan lainnya. Lalu, mana

saja yang masuk kategori prestasi," jelas Hetifah.

Menurut Hetifah, karena penghargaan kepada atlet ini ada banyak variabelnya, tentu saja hal ini tidak hanya melibatkan satu kementerian saja. Misalnya atlet itu akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu ini wilayah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) yang lebih tahu tentang syarat ASN. (aen)